

**RESPON NEGARA KIRIBATI TERHADAP  
ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM TAHUN 2003-  
2015**

*Kiribati Response Towards Climate Change Threat In  
2003-2015*

**Evi Nur Alviah**

[eviealviah3@gmail.com](mailto:eviealviah3@gmail.com)

**Program Studi Ilmu Hubungan Internasional  
*International Relations Department*  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
*Faculty of Social and Political Sciences*  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

***ABSTRACT***

*This Thesis presents a case study from the Republic of Kiribati to explore the response of the state towards Climate Change threat effect. Climate change is one of the greatest challenges for the world today. The intensity and frequency of climate induced disasters have increased in recent years. Low-lying and coastal countries like Kiribati are the most vulnerable to the adverse effects of climate change. These countries are already experiencing disasters such as floods, cyclones, tsunamis, etc. with millions of population displacements over the past years. In addition to increased climatic variability, however, Kiribati already faces some of the most extreme social, economic, and environmental challenges in the world, including high rates of overcrowding, poverty, and youth unemployment. The purpose of this thesis is to examine possible solution to*

*help address these issues. In addressing climate change threats, the World Bank, together with the Government of Kiribati initialised an adaptation programme (KAP) which aims to reduce Kiribati's vulnerability to climate change through mainstreaming adaptation into national economic planning. Kiribati also have the National Adaptation Programmes of Action under one of the international environmental regime called UNFCCC. The Government of Kiribati has taken the position that it would be irresponsible not to acknowledge the fact that the islands constituting the Republic of Kiribati might not be able to sustain life in the future, and has thereby included relocation as the second part of its adaptation strategy. The "migrating with dignity" strategy recently introduced by the President of Kiribati, Anote Tong to prevent the mass migration and "climate refugee" status. This strategy proposes gradual, planned migration based on "merit and dignity" can be possible with the development of training programs that provide more employment opportunities overseas.*

***Keywords: Kiribati, Climate Change, Kiribati Adaptation Program, Migration with Dignity, National Adaptation Program of Action, Sea Level Rise***

## **Pendahuluan**

Perubahan iklim merupakan isu yang kompleks dan memiliki pengaruh terhadap sistem alam dan manusia dari skala lokal sampai global. Distribusi biaya dan manfaat secara global yang tidak merata dan tak terduga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian tanggung jawab antar negara-negara atas dampak yang ditimbulkan (Gupta, 2006). IPCC menyatakan bahwa tingkat rata-rata kenaikan permukaan laut global telah meningkat selama pertengahan abad-19 ke awal abad 20 dari dua ribu tahun sebelumnya. Hal ini juga memberikan kemungkinan bahwa angka tersebut terus meningkat dari awal abad 20 (IPCC, 2013:9). Kenaikan permukaan laut yang bertahap sebagai pengaruh besar dari perubahan iklim, akan mengancam dataran rendah dan semakin meningkatkan kerusakan yang disebabkan oleh badai gelombang besar (Warren, Arnell, Nicholls, Levy and Price, 2006:67). Menurut Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), kenaikan permukaan laut diperkirakan dapat mengancam infrastruktur dan struktur pendukung mata pencaharian banyak masyarakat di Kepulauan Pasifik.

Kombinasi dari perubahan kondisi peristiwa ekstrim memberi kemungkinan bahwa lingkungan atol di Kepulauan Pasifik mungkin tidak dapat bertahan sebagai tempat tinggal manusia. Mantan ketua IPCC Robert Watson mengatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil menghadapi kemungkinan hilangnya seluruh budaya melalui dampak perubahan iklim (Watson, 2000) dalam (Barnett & Adger, 2003). The World Bank memperkirakan bahwa pada tahun 2050 Tarawa sebuah atol di Kiribati dapat menghadapi kerusakan tahunan setara 13-27% dari PDB Kiribati (Bank Dunia, 2000).

Kiribati terdiri dari 32 atol yang tersebar di Samudra Pasifik bagian selatan (McNamara, 2015) dengan 3 kelompok pulau yaitu Kepulauan Gilbert di sebelah barat, Kepulauan Phoenix berada di tengah dan Kepulauan Line di sebelah timur. Republik Kiribati membentang seluas tiga setengah juta kilometer persegi yang mencakup zona ekonomi eksklusif Kiribati. Dengan total lahan hanya sekitar 810 kilometer persegi, lebar pulau rata-rata kurang dari 1.000 meter, dan hanya 34% dari tanah di Kepulauan Gilbert dan negara tetangga Tuvalu lebih dari 2 m di atas permukaan laut (Woodroffe, 2008). Sedangkan proyeksi kenaikan permukaan air laut abad ini oleh IPCC diperkirakan (banyak digunakan oleh akademisi dan ilmuwan) didasarkan pada sejumlah skenario potensial dan berkisar dari 0,18-0,59 meter (Anderson & Convention, 2012:13). Hal ini menyebabkan Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peningkatan erosi pantai, banjir dari badai dan gelombang pasang, kekeringan, kontaminasi dan terbatasnya pasokan air tawar. Perubahan iklim di Kiribati akan mengurangi akses ke berbagai sumber daya alam yang memainkan peran kunci dalam kehidupan masyarakat i-Kiribati. Selain ancaman yang ditimbulkan oleh kenaikan permukaan laut, curah hujan menjadi lebih tidak teratur sehingga menyebabkan pasokan air bersih jauh dari standar WHO yang direkomendasikan 50 liter per hari untuk satu orang.

### **Dialog dan Perkembangan Perubahan Iklim**

Pada tahun 1979 diadakan konferensi besar pertama mengenai perubahan iklim yaitu *World Climate Conference*, yang diselenggarakan oleh *World Meteorological Organization (WMO)* bekerja sama dengan *United Nation's Educational, Scientific and*

*Cultural Organization (UNESCO), Food and Agriculture Organization (FOA), World Health Organizations(WHO)* dan *United Nations Environmental Programme (UNEP)*. Konferensi ini meminta masyarakat ilmiah untuk mengambil tindakan terhadap variabilitas iklim dan menilai dampak bagaimana perubahan iklim mempengaruhi kehidupan manusia. Konferensi tersebut membentuk kelompok kerja untuk menilai berbagai aspek perubahan iklim, termasuk ilmu fisika, sosio-ekonomi, dampak yang dihasilkan, dan strategi mitigasi.

UNFCCC, adalah sebuah perjanjian internasional yang diadopsi di Rio de Janeiro pada KTT Bumi pada tahun 1992. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1994 dan sejak UNFCCC mulai ada, 197 pihak telah meratifikasi konvensi, sehingga hal ini yang menjadikan Konvensi ini sebagai salah satu perjanjian tertinggi yang disahkan di dunia. UNFCCC mendefinisikan bahasa penting yang digunakan dalam wacana perubahan iklim. Pasal 4 UNFCCC berisi sebuah komitmen untuk memberikan bantuan kepada SIDS agar mereka dapat menangani kemungkinan dampak pemanasan global, terutama negara-negara dengan daerah pesisir dataran rendah yang paling rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim (United Nations 1992).

*The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* dibentuk untuk memberikan saran dan informasi ilmiah independen mengenai dampak perubahan iklim. Badan internasional ini dibentuk oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *World Meteorological Organisation (WMO)* untuk menilai informasi ilmiah, teknis dan sosio-ekonomi tentang perubahan iklim. Salah satu kontribusi signifikan IPCC adalah mengungkap risiko perubahan iklim yang terjadi

ke negara-negara kepulauan kecil. Meningkatnya pentingnya isu perubahan pesisir sehubungan dengan pulau-pulau dataran rendah menjadi fokus Kelompok Kerja 2 IPCC. Meningkatnya pentingnya perubahan iklim dan dampaknya terhadap pulau-pulau dataran rendah di Pasifik secara bertahap menjadi penting dalam agenda kegiatan IPCC (Grimshaw, 2016).

### **Dampak Perubahan Iklim Di Kiribati**

Dalam konsep *human security* terdapat empat aspek keamanan multidimensional yaitu *economic security*, *environmental security*, *food security*, dan *health security*. Keempat aspek keamanan dalam human security tersebut memiliki hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dalam konteks perubahan iklim dan *sea level rise*. Sebagai negara kepulauan terpencil dengan dataran yang sangat rendah, Kiribati telah menghadapi beberapa masalah ekonomi-sosial yang diperparah oleh pengaruh dari perubahan iklim. Sehingga hal tersebut memberikan ancaman terhadap keamanan multidimensional Kiribati.

Perubahan iklim di Kiribati diprediksi akan mengurangi akses terhadap berbagai sumber daya alam yang memainkan peran kunci penghidupan di Kiribati (Webber, 2013). Dalam IPCC Assessment Report yang ke-4 telah membahas tentang perkiraan dampak kenaikan permukaan laut dan perubahan iklim di negara kepulauan kecil termasuk Kiribati. Laporan tersebut berisi 3 garis besar pengaruh perubahan iklim pada degradasi lingkungan yaitu, kepulauan kecil rentan terhadap kenaikan permukaan air laut dan bencana ekstrem yang terkait dengan perubahan iklim, kenaikan permukaan laut akan memperburuk banjir, gelombang badai dan erosi pantai yang membahayakan permukiman dan

infrastruktur di pulau-pulau kecil, dan sumber air akan menjadi tantangan serius di bawah pengaruh perubahan iklim.

Mengingat bahwa Kiribati merupakan negara kepulauan yang memiliki dataran rendah dengan rata-rata 2m diatas permukaan laut, peningkatan *sea level rise* akan menghasilkan erosi pantai dan berkurangnya lahan. IPCC juga memperkirakan bahwa perubahan iklim akan mengancam infrastruktur vital, permukiman dan fasilitas yang mendukung penghidupan masyarakat Kiribati. Bencana alam seperti badai dan gelombang pasang telah meningkat beberapa tahun terakhir. Bencana ini menyebabkan banjir dahsyat dan kerusakan lingkungan. Pada tahun 2004 dan 2005 dua gelombang pasang terjadi di ibu kota, yang salah satunya mencapai ketinggian hingga 2,87 m mengakibatkan banjir, erosi pantai, kontaminasi air laut terhadap pasokan air tawar, hilangnya lahan pertanian, dan kerusakan yang luas terhadap infrastruktur di Kiribati termasuk sea-walls, jalan raya, dermaga, rumah, dan rumah sakit. Selain itu terjadi degradasi lingkungan di daerah pesisir yang diakibatkan oleh adanya pembangunan sea-walls, reklamasi lahan dan penambangan pasir serta karang dari pantai yang digunakan untuk konstruksi bangunan.

Kiribati dikelilingi oleh laut dan kekurangan sumber air tawar dari danau dan sungai karena letak geografisnya. Oleh karena itu Kiribati hanya mengandalkan lensa air tawar (air bawah tanah) dan air hujan. Lensa air tawar merupakan satu-satunya cadangan air bersih yang ada di Kiribati, namun keberadaan air bersih ini sering terkontaminasi oleh air laut dan limbah. Curah hujan juga mempengaruhi kuantitas lensa air tawar. Karena pengaruh perubahan iklim yang meningkatkan suhu dapat menurunkan tingkat curah

hujan dan meningkatkan tingkat kekeringan. Menurut IPCC penurunan rata-rata 10% curah hujan hingga tahun 2050, akan menghasilkan pengurangan sebanyak 20% ukuran lensa air tawar di Tarawa, Kiribati.

Kiribati merupakan salah satu negara termiskin di Pasifik dengan sumber daya alam berbasis lahan yang minim dan sangat bergantung pada bahan bakar fosil impor untuk kebutuhan energi dan transportasi (Burton, Mustelin, & Urich, 2011). Total Produk Domestik Bruto (PDB) Kiribati hanya berjumlah 186 juta US\$ pada tahun 2014 dan menurun hingga 160 juta US\$. Pendapatan Kiribati sangat bergantung pada beberapa sektor seperti penjualan surat izin penangkapan ikan bagi armada perikanan internasional (biaya akses mencakup lebih dari 50% pendapatan pemerintah tahunan dan menambahkan sekitar 22% dari PDB). Infrastruktur lokal dianggap kurang memadai untuk mengeksploitasi sektor perikanan secara efektif sehingga Kiribati menggunakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai pemasukan dari royalti atas penyewaan lautan untuk memancing. Selain itu pendapatan nasional kiribati juga berasal dari bantuan asing yang diperkirakan menyumbangkan 34% pada pendapatan nasional negara terutama dari Australia, Jepang, New Zealand Aid, World Bank, Amerika Serikat, Uni Eropa, Asian Development Bank, dan PBB (Duong, 2015:16).

Pertanian juga menjadi salah satu penopang kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi di Kiribati, namun hanya sedikit tanaman pertanian yang dapat tumbuh di atol. Terjadinya bencana cuaca ekstrem dapat menyebabkan kerusakan tanaman pangan dan bahan penghidupan lainnya yang tidak dapat diperbaiki. Kekeringan yang terus berlanjut seringkali menyebabkan kerusakan pada tanaman pertanian yang menghasilkan

rendahnya ekspor dan impor (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2007). Analisis lingkungan negara oleh Hay dan Onorio menunjukkan bahwa kerentanan terhadap dampak iklim dan cuaca sangat penting untuk perencanaan ekonomi di Kiribati secara keseluruhan (ADB, 2006).

### **Upaya Kiribati Dalam Adaptasi Dari Ancaman Perubahan Iklim**

Menjelang akhir 1980an, pemerintah Kiribati telah memulai untuk meminta bantuan internasional sehubungan dengan dampak *sea level rise* dan perubahan iklim ekstrim. Selain itu upaya dengan mengembangkan kebijakan juga telah dilakukan. Sejak tahun 1990an dan awal 2000an dunia internasional memperkenalkan berbagai inisiatif kebijakan untuk mengatasi dampak perubahan iklim di tingkat internasional dan regional yang didukung oleh pemerintah Kiribati. Periode ini juga merupakan perkembangan prakarsa kebijakan domestik terkait perubahan iklim.

Sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 1979 pemerintah Kiribati aktif berpartisipasi di lingkungan internasional terutama pada proses dan negosiasi PBB, hal ini dikarenakan akses terhadap keuangan internasional dianggap sebagai bagian integral dari pembangunan Kiribati. Pemerintah menjadi anggota dalam UNFCCC pada tahun 1995. Keikutsertaan Kiribati dalam UNFCCC menunjukkan bahwa pemerintah Kiribati membutuhkan rezim lingkungan internasional untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyelesaikan kewajibannya terkait perubahan iklim di bawah UNFCCC.

Anggota negara yang kurang berkembang di UNFCCC diharuskan untuk menyerahkan *National Communications* dalam tiga tahun pertama setelah menjadi anggota dan setiap empat tahun setelahnya. *National Communications* memberikan informasi tentang emisi gas rumah kaca dan langkah-langkah untuk mengurangi serta memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan iklim dan informasi yang relevan untuk mencapai tujuan Konvensi (UNFCCC, 2011). Pada September 1999 Kiribati bekerjasama dengan *Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP)* menghasilkan *National Communication on Climate Change* dan mengirimkannya pada UNFCCC pada tanggal 30 Oktober 1999 sedangkan *National ommunications* kedua diserahkan pada tanggal 27 Juni 2013 (Prance, 2016).

### **National Adaptation Programmes of Action (NAPA)**

Pada COP 4, kebutuhan khusus negara-negara terbelakang untuk pendanaan dan transfer teknologi menjadi sorotan oleh UNFCCC. Tiga tahun kemudian konsep NAPA diperkenalkan pada pelaksanaan COP 7. Proses NAPA dirancang untuk memberi LDC kesempatan untuk mengidentifikasi kegiatan prioritas yang merespons kebutuhan mendesak mereka terkait adaptasi terhadap perubahan iklim. Kiribati menyerahkan NAPA mereka ke UNFCCC pada bulan Januari 2007 dan tiga prioritas adaptasi utama adalah: 1) adaptasi sumber daya air dan perbaikan sumur sederhana; 2) pengelolaan zona pesisir; dan 3) memperkuat informasi dan pemantauan perubahan iklim.

*The National Adaptation Program of Action* (NAPA) merupakan perencanaan tidak urgensi yang berlangsung selama 3 tahun dalam beradaptasi dengan

perubahan iklim (Republic of Kiribati, 2015). Dalam proses pelaksanaan NAPA dilakukan analisa untuk memahami dan mengatasi penyebab kerentanan negara dengan mempertimbangkan sistem sosial dan ekologi, kebutuhan, budaya lokal, sistem politik, nilai-nilai dan sistem pengetahuan. Tujuan NAPA adalah untuk berkontribusi dan secara berkala melengkapi kerangka adaptasi jangka panjang dengan mengidentifikasi kebutuhan adaptasi yang mendesak sesuai dengan strategi pembangunan nasional dan strategi adaptasi perubahan iklim nasional (Government of Kiribati, 2007). NAPA menguraikan 9 proyek prioritas senilai US \$ 11.983 juta untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek (3 tahun) di sektor-sektor yang rentan akan perubahan iklim (air, pengelolaan zona pesisir, pertanian, infrastruktur pesisir) dan untuk memperkuat kapasitas adaptasi dan sistem informasi nasional (Republic of Kiribati, 2015).

Pelaksanaan NAPA Kiribati didukung oleh *Least Developed Country Fund* dan dibentuk di bawah *Ministry of the Environment, Land and Agriculture Development* (MELAD) pada awal tahun 2003 (World Bank, 2006a: 53). Selama Konsultasi Nasional dilakukan identifikasi peringkat prioritas untuk masing-masing strategi. Kriteria yang digunakan dalam menilai suatu strategi yaitu ; tingkat kerentanan yang ditangani, biaya yang efisien, tingkat urgensi, dampak lingkungan, dapat diterima secara budaya, tingkat implementasi, partisipatif, bersinergi dengan pengentasan kemiskinan, dan bersinergi dengan kesepakatan lingkungan multilateral lainnya.

## **Kiribati Adaptation Program**

Selanjutnya pada tahun 2003, Republik Kiribati membentuk program inisiasi yang dinamakan *Kiribati Adaptation Programme* (KAP). *Kiribati Adaptation Programme* (KAP) merupakan program bernilai AS\$5.5 juta dengan dukungan dari *United Nations Development Program* (UNDP), *United Nations Environment Programme* (UNEP), World Bank, Pemerintah Australia, Global Environment Facility (GEF), Least Developed Country Fund (LDCF), Japan Policy and Human Resources Development (PHRD), Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR), dan kontribusi dari Pemerintah Kiribati sendiri. Program adaptasi ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan Kiribati dari dampak perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut dengan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim. Tahap persiapan KAP, yang berlangsung dari tahun 2003 sampai 2005, bertujuan untuk mempromosikan pengarusutamaan adaptasi perubahan iklim dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak perubahan iklim yang diperkirakan (Bank Dunia, 2003: 3-4). Tahap kedua merupakan penerapan *pilot project* berusaha untuk mengembangkan analisa sistematis terkait masalah iklim dan rancangan langkah-langkah adaptasi yang hemat biaya, dengan terus mengintegrasikan kesadaran dan respons resiko iklim ke dalam perencanaan ekonomi dan operasi (World Bank, 2011a:4). Tahap ketiga merupakan proses implementasi dari strategi yang telah dibentuk dalam tahap II. Tahap terakhir dari *Kiribati Adaptation Programme* (KAP) difokuskan untuk memperluas proyek yang ada, terutama yang terkait dengan kesadaran masyarakat, erosi pantai, dan keamanan air, untuk

mencapai keberhasilan adaptasi perubahan iklim dan kenaikan permukaan air saat ini dan di masa depan. Tahap ketiga ini berlangsung dari tahun 2010 sampai 2015.

## **Adaptasi Melalui Migrasi**

Dampak dari perubahan iklim tidak bisa lagi dianggap sebagai masalah lingkungan semata. Dampak ini bersifat lintas sektoral, mempengaruhi sektor ekonomi, budaya, politik dan sosial, yang menyebabkan tantangan lintas batas untuk negara-negara tetangga termasuk peningkatan populasi pengungsi dan menekankan sumber daya alam dan manusia, hal ini menandai perubahan iklim sebagai isu keamanan manusia secara global. *Commission on Human Security (CSH)* mengusulkan 2 strategi yaitu perlindungan dan pemberdayaan manusia untuk mencapai tujuan keamanan manusia sebagai bagian dari kerangka kebijakan keamanan manusia.

Perlindungan dan pemberdayaan manusia bersesuaian dengan konsep *Migration with Dignity*. Perlindungan didefinisikan sebagai "strategi, yang didirikan oleh negara, badan-badan internasional, LSM dan sektor swasta, untuk melindungi manusia dari ancaman" (CHS: 2003: 10). Perlindungan disini menunjuk pada strategi *Migration With Dignity* yang dilakukan sebagai upaya menanggulangi status pengungsi. Pemberdayaan didefinisikan sebagai "strategi yang memungkinkan orang untuk mengembangkan ketahanan mereka dalam situasi yang sulit" (CHS: 2003: 10). Sedangkan pemberdayaan yang dilakukan oleh strategi MWD adalah dengan memberikan pelatihan pada

I-Kiribati agar masyarakat mendapatkan kesempatan kerja di Negara lain.

Vulnerability sebagai hasil dari sea level rise di Kiribati membuat migrasi menjadi jalan keluar. Dengan strategi *Migration With Dignity* diharapkan migrasi yang mungkin terjadi dalam skala besar di kemudian hari dapat meminimalisir adanya fragmentasi dalam I-Kiribati, disintegrasi sosial dan hilangnya budaya Kiribati (O'Brien, 2013). Presiden Anote Tong berharap agar rakyatnya dapat menghindari dari istilah menjadi “*refugee*” dan dapat mempertahankan harga diri dan martabat mereka sebagai anggota dari masyarakat Kiribati. Kebijakan *Migration With Dignity* pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Anote Tong dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-67 pada September 2012 di New York, Amerika Serikat.

Menurut Presiden Tong bermigrasi bermartabat tidak seperti merelokasi I-Kiribati dari desa-desa dan menempatkan mereka di salah satu tempat di Australia, sebaliknya strategi ini berusaha mengusulkan migrasi yang terencana, secara bertahap berdasarkan konsep ‘merit & dignity’ yang dapat dilaksanakan dengan adanya pengembangan program pelatihan yang menyediakan kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya Australia dan Selandia Baru (O'Brien, 2013). Melalui strategi relokasi, pemerintah berusaha menciptakan peluang migrasi yang lebih baik dengan mengamankan opsi migrasi tenaga kerja melalui upskilling terutama pada generasi muda (MacLellan, 2011). KANI adalah salah satu program beasiswa yang ditawarkan Australia kepada Kiribati dalam bidang pendidikan keperawatan di Griffith University di Brisbane dan Disponsori oleh AusAD sebuah organisasi

bantuan luar negeri pemerintah Australia. Program ini dijadwalkan berjalan dari bulan Juni 2007 sampai Desember 2013. Melalui program ini generasi muda I-Kiribati memiliki kesempatan untuk mencapai kualifikasi keperawatan di Australia dan dapat menemukan pekerjaan di masa mendatang di luar negeri sehingga dapat membantu memperbaiki ekonomi Kiribati.

## **Kesimpulan**

Perubahan iklim menjadi isu yang banyak diperdebatkan sepanjang waktu. Perubahan iklim global akan mempengaruhi setiap orang di dunia dan akan merasakan dampak yang ditimbulkan meskipun dampak yang dirasakan berbeda-beda. Beberapa contoh dampak perubahan iklim yang sangat berpengaruh besar dalam lingkungan global adalah suhu yang meningkat, mencairnya gletser dan naiknya permukaan air laut. Berbagai dampak tersebut telah menyadarkan berbagai aktor di dunia pentingnya penelitian terhadap perubahan iklim di arena global. Sehingga sejak tahun 1979 telah dilaksanakan berbagai konferensi dan konvensi mengenai perubahan iklim.

Sejak *Third Assessment Report (TAR)* pada tahun 2001, IPCC menekankan bahwa negara-negara *small island development states (SDIS)* termasuk *Pacific Island Countries (PICs)* merupakan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim. Protokol Kyoto menyebutkan sebagian besar hasil industrialisasi negara berkembang bertanggung jawab atas tingginya emisi gas rumah kaca saat ini. Sedangkan hampir semua negara-negara kecil di Pasifik memiliki kontribusi yang sangat rendah bagi peningkatan emisi karbon di dalam ozon yang menyebabkan perubahan iklim namun justru merekalah

yang paling rentan terkena dampak dari perubahan iklim. Sehingga Protokol Kyoto dan UNFCCC mendorong negara-negara industri maju untuk mengurangi dan menstabilkan emisi gas rumah kaca mereka. Namun, tidak semua negara maju telah berkomitmen terhadap kesepakatan tersebut. Hal ini menjadi jelas bahwa para pemimpin dunia telah terpecah dalam komitmen mereka untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Mantan ketua IPCC Robert Watson mengatakan bahwa negara-negara kepulauan kecil menghadapi kemungkinan hilangnya seluruh budaya melalui dampak perubahan iklim (Watson, 2000) dalam (Barnett & Adger, 2003). Proyeksi kenaikan permukaan air laut abad ini oleh IPCC diperkirakan didasarkan pada sejumlah skenario potensial dan berkisar dari 0,18-0,59 meter (Anderson & Convention, 2012:13). Hal ini menyebabkan Kiribati sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peningkatan erosi pantai karena kondisi pulau pulau atoll Kiribati yang hanya berada 2-3 meter diatas permukaan air laut.

Rezim lingkungan internasional telah banyak membantu Kiribati dalam mempersiapkan strategi untuk menghadapi perubahan iklim dengan menyediakan informasi dan platform tentang perubahan iklim global. Meskipun banyak konferensi dan konvensi mendukung SIDS dan negara-negara berkembang lainnya yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, namun tidak ada indikasi mengenai bagaimana bentuk bantuan-bantuan ini dan bagaimana hal tersebut harus dicapai. Akibatnya Kiribati harus berupaya semaksimal mungkin untuk merespon ancaman perubahan iklim.

Kiribati berada pada garis depan dalam menyuarkan nasib kehidupan SIDS dan PICs terutama negaranya yang berada dalam ancaman perubahan iklim. Disamping perubahan iklim, kondisi soseo-ekonomi Kiribati yang buruk seperti ledakan populasi di Tarawa yang menyebabkan banyaknya pengangguran, sumber daya yang terbatas, dan meningkatnya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri dan meningkatnya kriminalitas antar kaum muda. Kondisi tersebut kemudian diperburuk oleh pengaruh perubahan iklim yang mengakibatkan Kiribati mengalami degradasi lingkungan, keterbatasan air bersih, keamanan pangan, erosi pantai dan meningkatnya wabah penyakit serta kemungkinan terburuk adalah tenggelamnya negara Kiribati karena kenaikan permukaan air laut. Dalam prinsip pembangunan berkelanjutan bahwa pembangunan harus beriringan dengan perbaikan lingkungan karena keberlanjutan ekonomi tidak akan terwujud jika konflik sosial masih terjadi dan konflik sosial akan hilang jika lingkungan terpelihara. Sehingga sangat sulit bagi Kiribati untuk mencapai pembangunan ekonomi karena perubahan iklim mengancam sifat lingkungan Kiribati yang sudah rapuh.

Pemerintah menyadari bahwa Kiribati sangat rentan terhadap perubahan iklim dan sangat penting bagi Kiribati untuk mengembangkan kapasitasnya dalam menyelesaikan kewajibannya di bawah UNFCCC. Pelaksanaan Pasal 4.9 UNFCCC mengenai kebutuhan khusus negara-negara terbelakang untuk pendanaan dan transfer teknologi baru menjadi sorotan pada COP4. Tiga tahun kemudian konsep NAPA diperkenalkan pada pelaksanaan COP7. Kiribati menyerahkan NAPA mereka ke UNFCCC pada bulan Januari 2007 dengan tiga

prioritas adaptasi utama yaitu: 1) adaptasi sumber daya air dan perbaikan sumur sederhana; 2) pengelolaan zona pesisir; dan 3) memperkuat informasi dan pemantauan perubahan iklim. Pada tahun 2003, Kiribati membentuk program inisiasi yang dinamakan Kiribati Adaptation Programme (KAP). Meskipun program ini merupakan strategi yang berasal dari pemerintah, namun dalam pelaksanaannya memiliki pengaruh dari pihak yang mendukung KAP terutama World Bank. Sementara KAP dibentuk untuk memenuhi kebutuhan perencanaan jangka panjang, NAPA berfokus pada kebutuhan adaptasi yang mendesak.

Sedangkan untuk mempersiapkan tantangan jangka panjang *sea level rise*, Kiribati memiliki strategi kebijakan *Migration with Dignity*. Seiring kelangsungan hidup jangka panjang negaranya dan rakyatnya menjadi semakin terancam, Presiden Anote Tong mengakui bahwa walaupun dengan pengembangan dan pelaksanaan program adaptasi perubahan iklim, seperti pembangunan tembok laut, penanaman bakau, dan pemanenan air hujan, relokasi permanen dapat dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah Kiribati berusaha mengembangkan peluang baru bagi warganya untuk bermigrasi ke luar negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk mempersiapkan I-Kiribati menghadapi kemungkinan migrasi ke negara lain tanpa menyandang status pengungsi. Strategi ini mengusulkan migrasi yang terencana, secara bertahap berdasarkan konsep 'merit & dignity' yang dapat dilaksanakan dengan adanya pengembangan program pelatihan yang menyediakan kesempatan bekerja di luar negeri, khususnya Australia dan Selandia Baru.

### **Daftar Pustaka**

- Anderson, P., & Convention, D. 2012. *Where To Now ? The Potential For Climate Change-*, 1–86.
- Barnett, J., and Campbell, J. 2010. *Climate Change and Small Island States: Power, Knowledge, and the South Pacific*. London: Earthscan Ltd.
- Crowther, Ashley. *Sea-Level Rise and Migration: Pacific Islands*. Diakses di <http://www.ashleycrowther.org/sea-level-rise-and-migration-pacific-islands/> pada 7 Desember 2017.
- Dizard, Wilson. *Plagued by Sea-Level Rise, Kiribati Buys Land in Fij*. Diakses di <http://america.aljazeera.com/articles/2014/7/1/kiribati-climatechange.html> ada 20 November 2017.
- Grimshaw, Mark Nicholas. 2016. *Implications Of Climate Change For The Livelihoods Of Urban Dwellers In Kiribati*. Thesis of The University Wikato
- Gupta, J. 2006. *International law and climate change: The challenges facing developing countries*. Yearbook of International Environmental Law.
- O'Brien, Lara K., 2013. *Migration With Dignity: A Study of Kiribati-Australia Nursing Initiative (KANI)*. thesis master of University of Kansas.

Dosen Pembimbing



**Ade Marup Wirasenjaya S.IP., M.A**  
**NIK.163064**